

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil pembahasan di atas penulis menarik suatu kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah berikut:

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A ayat (1) dan (2) yakni dimana pelaku penyebaran berita palsu (*hoax*) dengan mempunyai niat untuk menambahkan, menyebarkan, membuat, mengurangi dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu berdasarkan pasal 45A ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pasal (2) menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

Mengacu pada hasil kesimpulan, jadi penulis memberikan saran sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada saat ini masih belum ditegakkan secara adil, karena berdasarkan dari perbuatan setiap terdakwa yang telah dipaparkan oleh penulis, bahwa sanksi pidana yang seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum kepada terdakwa yang telah melakukan perbuatan dalam pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat juga harus diberi sanksi lebih besar, akan tetapi faktanya penjatuhan sanksi tersebut ternyata jauh lebih kecil dibanding peraturang undang-undang yang berlaku. Sedangkan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan pengaruh yang tidak cukup besar diberi hukuman yang tidak sesuai dengan sanksi terdakwa yang melakukan tindak pidana berat, oleh sebab itu penegak hukum seharusnya lebih mempertimbangkan dengan tegas atas setiap putusan yang diberikan oleh terdakwa, agar masyarakat mampu berfikir secara bijak dengan setiap putusan dari penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Freddy Haris, 2004, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, S.H, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan saleh, 1986 *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sahrul Mauludi, 2018, *Awat Hoax, Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Kompas Gramedia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Website

Anto Satriyo Nugroho, Tips Menghadapi *Hoax* dan Spam. www.ilmukomputer.com diakses pada tanggal 29 februari 2019.

Cyber Crime, hlm.1, <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-cyber-crime.html>, diakses pada 21 agustus 2019

Ma Rufal Kharki, Kejahatan Dalam Etika Profesi, hlm.1, <http://balikompuserservice.com/blog-etika-profesi.html>, diakses pada 21 agustus 2019

Ruang lingkup Cyber crime <https://akuntansikblog.wordpress.com/definisi-cybercrime-2/>, diakses pada 21 agustus 2019

Urwati Usqa, Kejahatan Di Dunia Maya (*Cyber Crime*), http://www.kangbudhi.com/2018/07/kejahatan-di-dunia-maya-cyber-crime_28.html, diakses 21 agustus 2019

<http://m.liputan6.com/news/read/2156308/ervani-terdakwa-pencemaran-nama-baik-via-facebook> diakses pada 21 agustus 2019

<http://regional.kompas.com/read/2018/05/08/1283511/seorang-tokoh-agama-divonis-2-tahun-penjara-dalam-kasus-ujaran-kebencian> diakses pada 21 agustus 2019

<https://nasional.tempo.com/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>, diakses pada 21 agustus 2019

<http://m.liputan6.com/news/read/3881762/perjalanan-kasus-dugaan-ujaran-kebencian-ahmad-dhani> diakses pada tanggal 25 Agustus 2019